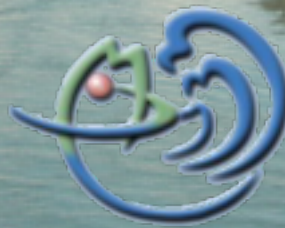


KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PESISIR BERBASIS MASYARAKAT

Oleh :

**Dr. Ir. Irwandi Idris, M.Si
Direktur Pesisir dan Lautan**



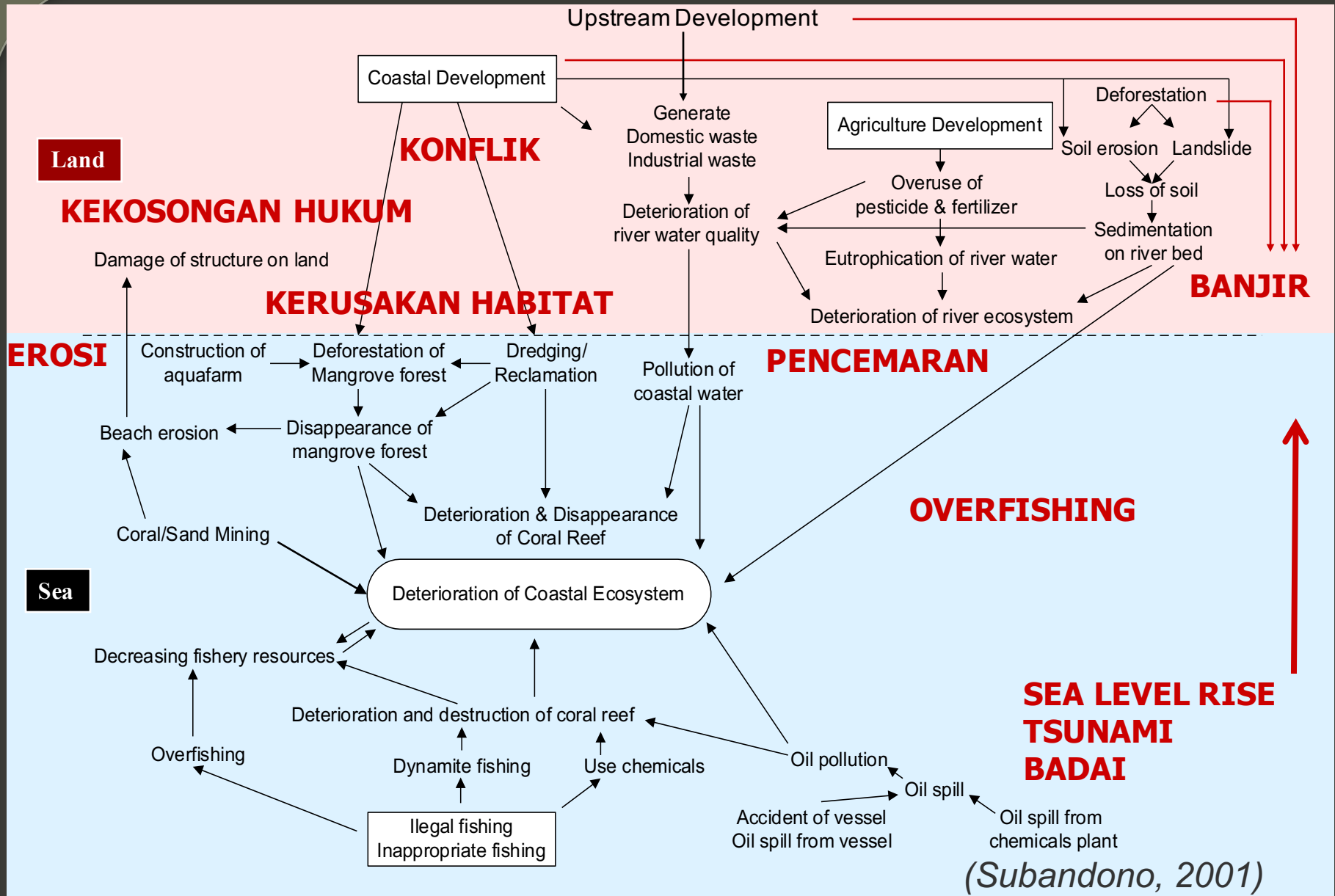
**DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2006**

ISU PENGELOLAAN WILAYAH DAN SUMBERDAYA PESISIR DAN PPK

- KONFLIK PEMANFAATAN RUANG DAN KEWENANGAN
- KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR (80% relatif miskin dengan tingkat pendidikan rendah)
- DEGRADASI KUALITAS LINGKUNGAN PESISIR
 - 42% Terumbu Karang rusak berat, 29% rusak, 23% baik dan hanya 6% sangat baik
 - 40% hutan mangrove telah rusak
 - Berkurangnya stok sumberdaya ikan
 - Pencemaran Laut & Pesisir

ISU PENGELOLAAN WILAYAH DAN SUMBERDAYA PESISIR DAN PPK

- **RAWAN BENCANA ALAM**
 - Abrasi, Erosi pantai, tsunami dll
- **SUMBERDAYA PPK BELUM DIKELOLA SECARA OPTIMAL**
- **PENGELOLAAN KONSERVASI LAUT BELUM OPTIMAL**
- **KETIDAKPASTIAN DAN KEKOSONGAN HUKUM**
- **SUMBERDAYA KELAUTAN NON KONVENSIONAL BELUM DIKELOLA SECARA OPTIMAL**
- **BATAS WILAYAH LAUT DENGAN NEGARA TETANGGA BELUM DISEPAKATI**



Keterkaitan Dampak Kegiatan Manusia dan Alam dengan Ekosistem Pesisir

VISI & MISI DITJEN KP3K

VISI

PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PPK SECARA OPTIMUM DAN LESTARI BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

MISI

- **MEMFASILITASI TERWUJUDNYA PENATAAN RUANG UNTUK KEPENTINGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMBANGUNAN DI WILAYAH LAUT, PESISIR DAN PPK**
- **MEMPERBAIKI SISTEM PENGELOLAAN PESISIR DAN LAUTAN UNTUK KESEIMBANGAN ANTARA PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN**
- **MENDORONG PERTUMBUHAN INVESTASI PULAU-PULAU KECIL YANG BERKELANJUTAN DAN BERBASIS MASYARAKAT**
- **MENGEMBANGKAN KONSERVASI SUMBERDAYA IKAN MELALUI UPAYA PERLINDUNGAN, PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN YANG BERKELANJUTAN PADA TINGKAT EKOSISTEM, JENIS DAN GENETIK**
- **MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PESISIR DAN PPK**

FUNGSI DITJEN KP3K

LINGKUNGAN

SOSIAL

Pemeliharaan
dan Perbaikan
Ekosistem
Pesisir dan Laut

Pemberdayaan
Masyarakat
Pesisir

DITJEN. KELAUTAN, PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL

Pendayagunaan
Pulau-pulau
Kecil dan SD
Kelautan Non
Konvensional

Pengelolaan
ALKI, Pipa dan
Kabel Bawah
laut, dan
Pengelolaan Wil
Perbatasan

EKONOMI

KEWILAYAHAN

KEBIJAKAN DITJEN KP3K

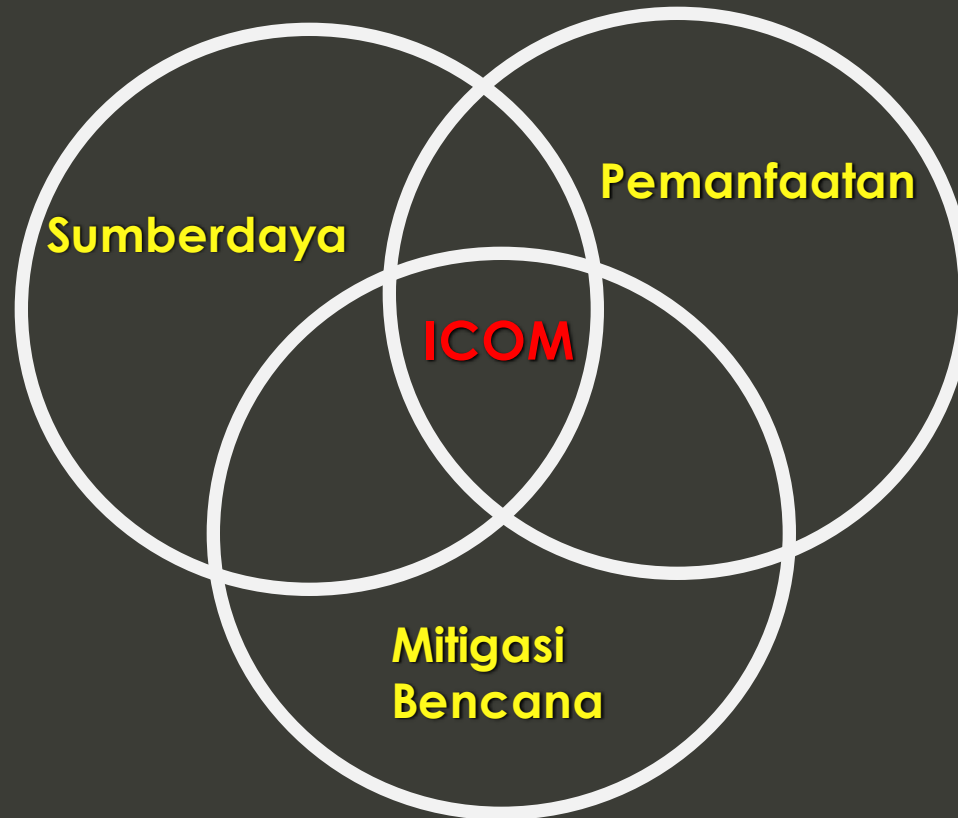
- Mendorong Penerapan Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Integrated Coastal and Ocean Zone Management) → ICOM
- Sebesar-besarnya memfasilitasi keikutsertaan masyarakat pesisir dan PPK dalam pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan PPK → PEMBERDAYAAN
- Prioritas Pengelolaan PPK terluar dan /atau di wilayah perbatasan → SOVEREIGNITY AND PROSPERITY

- Pengembangan penelolan SD Kelautan non-konvensional untuk mendukung pembangunan ekonomi → OPTIMALISASI
- Mendorong terwujudnya harmonisasi antara Perguruan Tinggi, LSM, Swasta dan stakeholder lainnya dengan pemangku kebijakan pengelolaan pesisir dan PPK di Pusat & Daerah → KEMITRAAN
- Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi pembangunan terpadu lintas sektor dlm pengelolaan SD Kelautan pesisir dan PPK → KOORDINASI
- Pengelolaan ALKI, Pipa dan Kabel Bawah Laut, dan Pengelolaan Wil Perbatasan → KEWILAYAHAN

STRATEGI IMPLEMENTASI

- ◉ Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
- ◉ Penataan Ruang
- ◉ Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat
 - Penyiapan Peraturan Perundangan (RUU PWP)
 - MCRMP (Small Scalle Natural Resources Management)
 - Coremap II (Pengelolaan SD Terumbu Karang Berbasis Masyarakat)
- ◉ Pendayagunaan Potensi Sumberdaya Kelautan Non-Konvensional
- ◉ Pendayagunaan Potensi SD Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- ◉ Pengelolaan Konservasi Laut
- ◉ Pengembangan Kemitraan dgn Perguruan Tinggi dan Stakeholders lainnya

PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

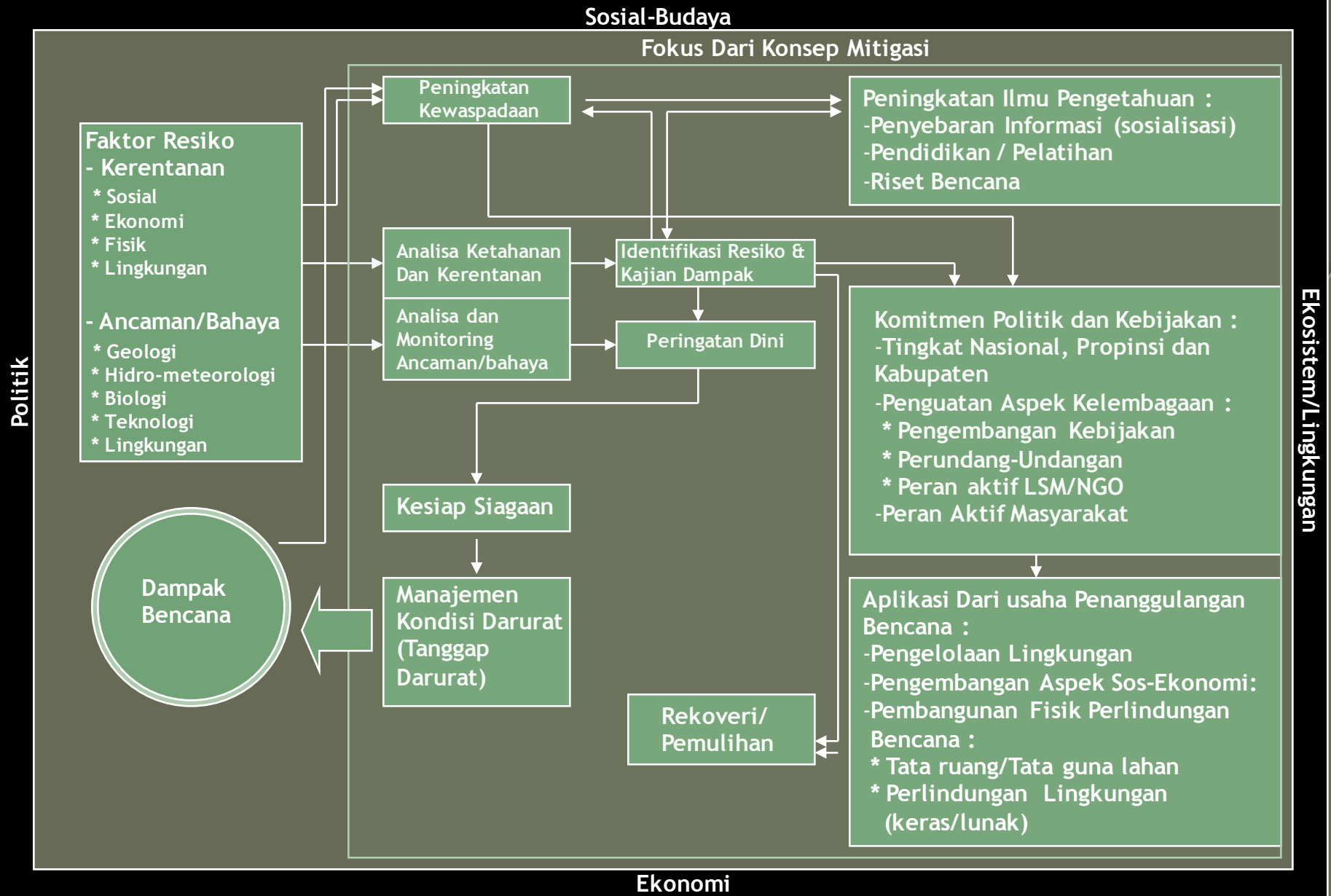


ICOM=Integrated Coastal Zone and Ocean Management

(Subandono, 2001)

Diagram Alir Dari Konsep Mitigasi Bencana

Konsep Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Terpadu



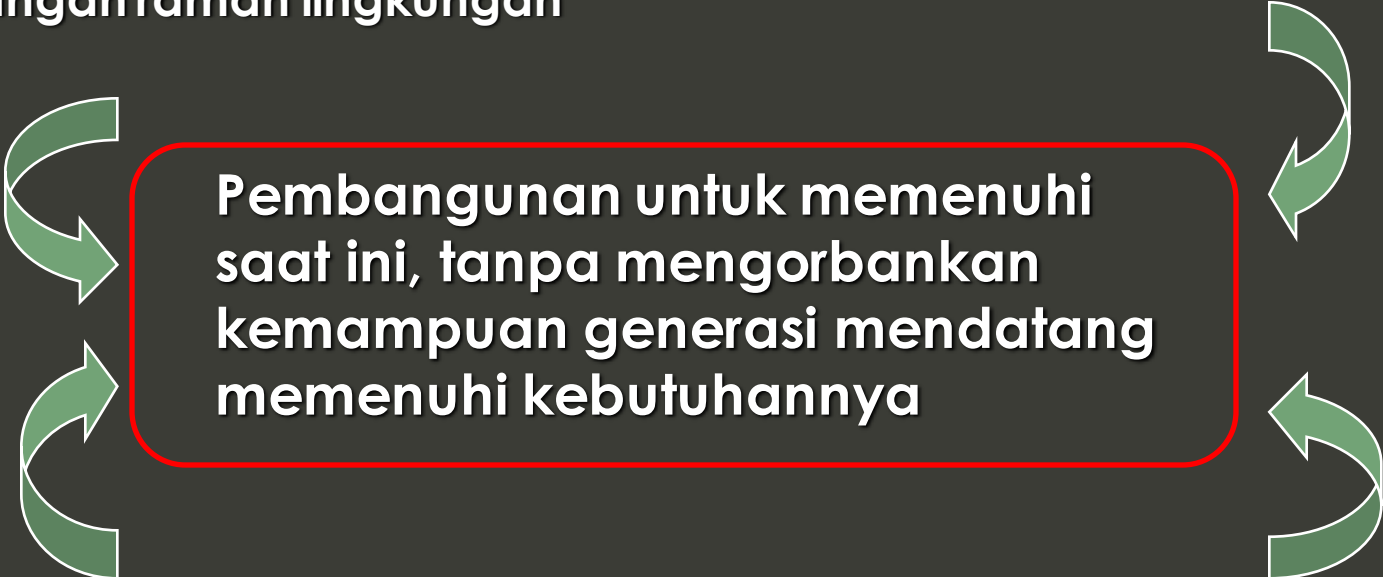
APLIKASI PEMBANGUNAN PESISIR DAN LAUT BERKELANJUTAN DALAM ICOM

KAIDAH EKOLOGIS

- Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu(renstra, zonasi, MP, AP)
- Pemanfaatan optimal
- Pengendalian pencemaran
- Rancangan ramah lingkungan

KAIDAH SOSEKBUD

- Peningkatan kesejahteraan
- Pemerataan



Pembangunan untuk memenuhi saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya

KAIDAH SOSIAL POLITIK

- Sistem politik demokratis
- Sistem politik transparan
- Desentralisasi
- Pelibatan masyarakat

KAIDAH HUKUM/KELEMBAGAAN

- Penerapan aturan
- Penanaman etika
- Sentuhan nilai keagamaan

Perencanaan Harkis





Detached port untuk mengatasi masalah erosi/sedimentasi

**PROGRAM – PROGRAM
YANG DILAKSANAKAN DALAM RANGKA
PENGELOLAAN PESISIR
BERBASIS MASYARAKAT**



Program Marine & Coastal Resources Management (MCRMP)

1. LATAR BELAKANG

- Meningkatnya laju kerusakan ekosistem pesisir dan lemahnya kapasitas kelembagaan di daerah untuk mengelola sumberdaya pesisirnya pasca otonomi daerah di wilayah pesisir.
- Pemanfaatan sumberdaya pesisir telah mengakibatkan penurunan kualitas ekosistem pesisir yang meluas
- Hal ini disebabkan karena : (i)kurangnya pendekatan terpadu pada perencanaan dan pengelolaan zona pesisir, (ii) informasi dan data yang menjadi dasar keputusan pengelolaan sumber daya, (iii) keterbukaan dalam alokasi sumber daya, dan (iv) keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya

2. Tujuan : Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan, konservasi dan proteksi terhadap lingkungan dalam kerangka Desentralisasi

3. Sasaran : meningkatnya kemampuan daerah dalam :

- 1. Menyusun dokumen perencanaan ICZPM mulai dari renstra, zonasi, management plan, dan rencana aksinya**
- 2. Menginventarisasi, mengolah, dan mengelola data dan informasi sumberdaya kelautan untuk menunjang pembangunan pesisir dan laut**
- 3. Meningkatkan kerangka hukum dan pengaturan sektor kelautan di daerah**
- 4. Mempraktekkan dokumen perencanaan yang telah disusun dalam bentuk pengelolaan sumberdaya alam skala kecil.**

LOKASI MCRMP DI 15 PROPINSI

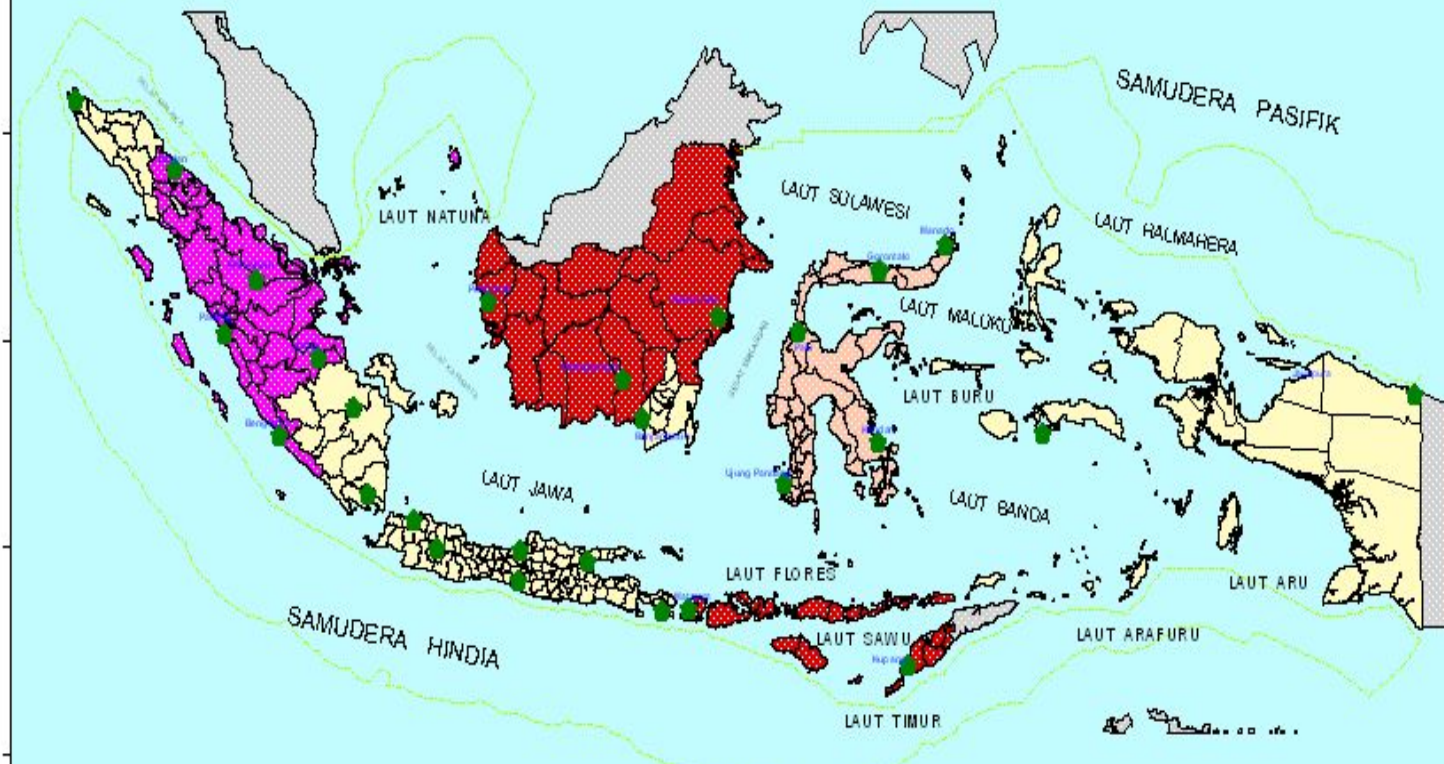


50 0 50 100 Km



Legenda :

- REGIONAL I
- REGIONAL II
- REGIONAL III



REGIONAL I (SULAWESI)	REGIONAL II (KALIMANTAN)	REGIONAL III (SUMATERA)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulawesi Utara 2. Gorontalo 3. Sulawesi Tengah 4. Sulawesi Tenggara 5. Sulawesi Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Kalimantan Timur 7. Kalimantan Tengah 8. Kalimantan Barat 9. NTB 10. NTT 	<ol style="list-style-type: none"> 11. Bengkulu 12. Riau 13. Jambi 14. Sumatera Barat 15. Sumatera Utara

KOMPONEN KEGIATAN

1. **Komponen Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut**
(Coastal Marine Resources Planning and Management)
2. **Komponen Data dan Informasi Spasial**
(Spatial Data and Information Management)
3. **Komponen Penegakan Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Laut**
(Marine and Coastal Resources Laws and Enforcement)
4. **Komponen Investasi Pengelolaan SDA Skala Kecil**
(Small Scale Natural Resources Management Schemes)

KOMPONEN PROYEK MCRMP

Hasil kerja

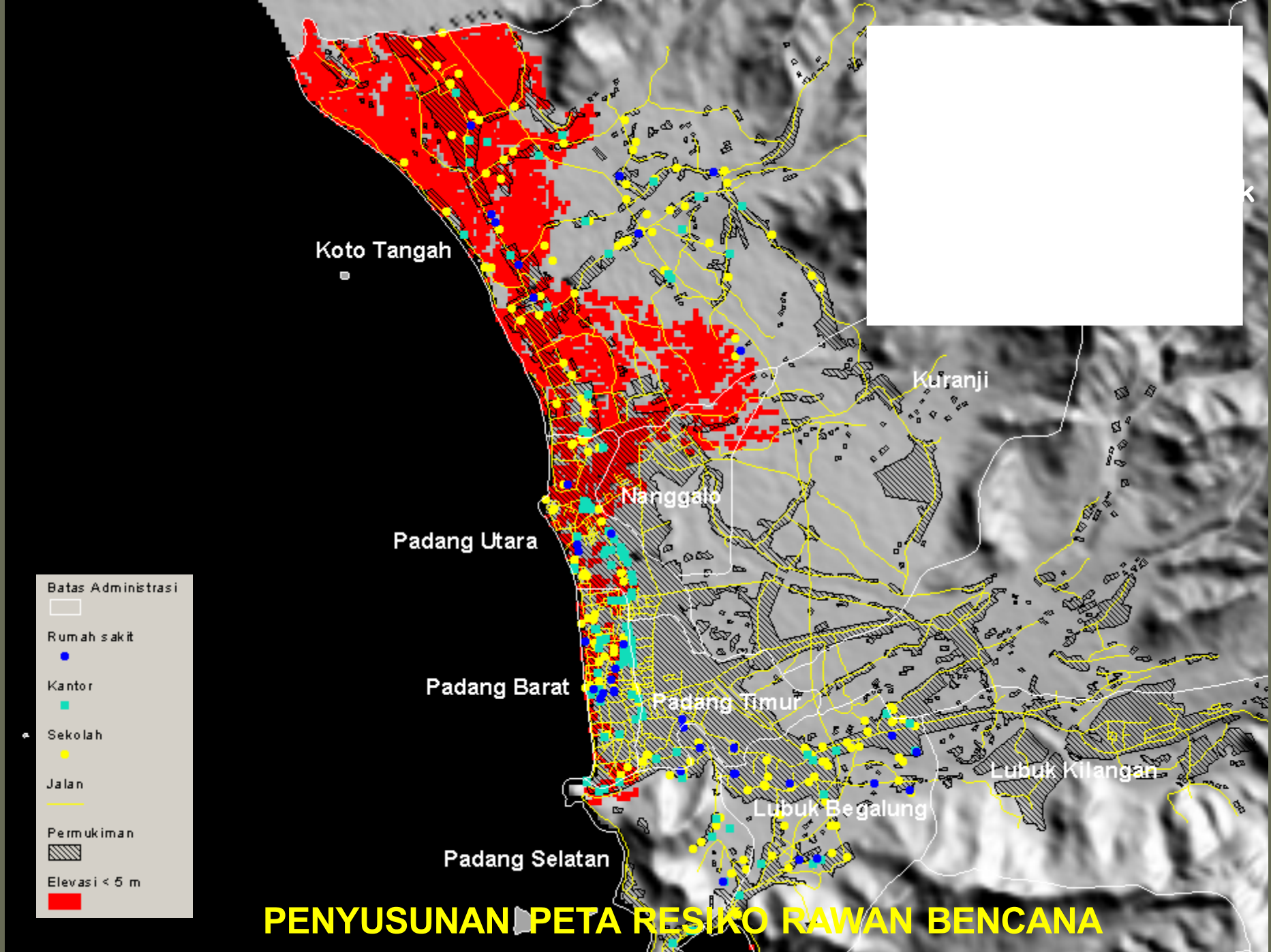
A Perencanaan
Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir
dan Laut

B Pengelolaan
Data dan Informasi
Spasial

C Review Legislasi
dan
Upaya Penegakan

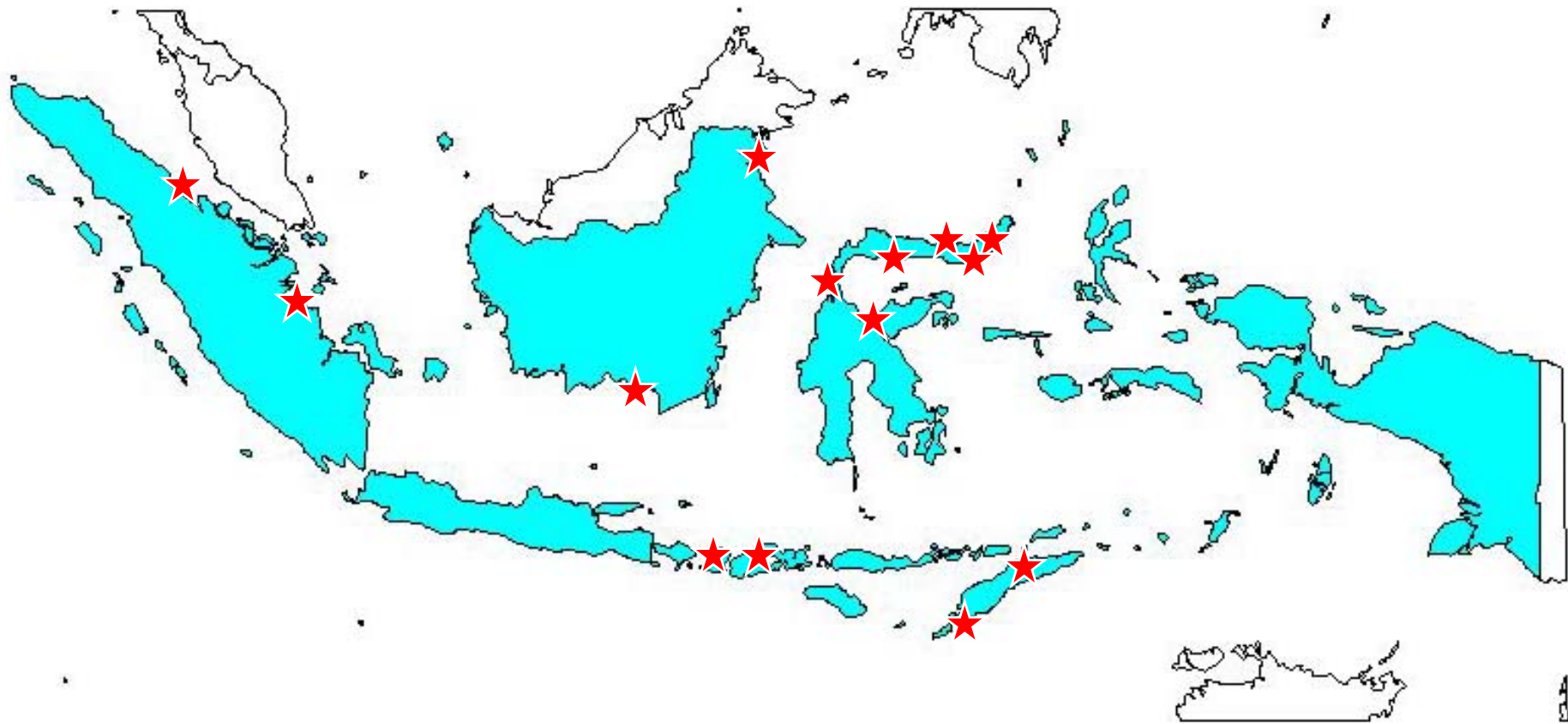
D Pengelolaan
Sumberdaya Alam
Skala Kecil

- 1) Pelaksanaan Kaji Terap dan Ekstensi di 25 Kab./Kota dengan kegiatan utama Mariculture
- 2) Pelaksanaan Skema Skala Kecil Pengelolaan Sumberdaya Alam di 41 Kab./Kota dengan jenis-jenis kegiatan (i) penguatan kelembagaan desa, (ii) *public awareness campaign* (kelestarian ekosistem, sanitasi, dll), (iii) rehabilitasi mangrove, (iv) perlindungan ekosistem, (v) identifikasi mata pencaharian alternatif, (vi) sistem pemantauan, dll.



- Batas Administrasi
- Rumah sakit
- Kantor
- Sekolah
- Jalan
- Permukiman
- Elevasi < 5 m

PENYUSUNAN PETA RESIKO RAWAN BENCANA



**LOKASI REHABILITASI MANGROVE YANG BERHASIL DITANAM
OLEH SNRMS TAHUN 2005**

URGENSI RUU PWP

MENGAPA SD PESISIR PENTING?

Peralihan ekosistem darat & laut, pusat biodiversity laut dunia, kaya sumberdaya; 26,5 % PDB, Banyak pulau kecil

KONDISI PESISIR

Degradasi sumberdaya pesisir, Terumbu karang rusak, Deforestasi mangrove, Persediaan ikan menurun, Kerusakan & abrasi pantai, Masyarakat pesisir miskin.

MENGAPA UU PWP DIPERLUKAN?

Keutuhan NKRI
Wilayah pesisir bersifat khusus
Mempunyai dimensi global
Konflik pengelolaan
Kekosongan hukum
Pemanfaatan Jangka Pendek
Masih sebagai Tempat Pembuangan Sampah

LANDASAN HUKUM

- Pasal 33 ayat 3 UUD 1945
- Konven Hukum Laut 1982
- UU lain yg terkait

TUJUAN UU :

1. Menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI
2. Memperbaiki mekanisme pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
3. Melindungi, merehabilitasi, dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan Pulau-pulau Kecil
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir
5. Memberikan kepastian hukum

CIRI-CIRI RUU PWP

- 1. Pendekatan wilayah dan keutuhan NKRI**
- 2. Penerapan norma wajib dan sukarela dalam pengelolaan wilayah pesisir**
- 3. Multi sektor dan multi level pemerintahan**
- 4. Pengakuan hak-hak masyarakat pesisir**
- 5. Koordinatif, integratif & konsistensi**
- 6. Penggunaan paradigma laut**

FOKUS RUU PWP

- 1. Menata Pengelolaan Pesisir di Wilayah Perbatasan dalam rangka kedaulatan NKRI**
- 2. Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu sukarela, wajib, serta akreditasi program**
- 3. Norma Pengelolaan Pesisir Terpadu**
- 4. Mekanisme keterpaduan dan konsistensi pembangunan pusat dan daerah**

MANFAAT UU PWP

- Mensinergiskan pentaatan dan Penegakan berbagai UU yang terkait dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir
- Mendorong kepastian berusaha dan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di wilayah pesisir dan mendorong peran pemda dalam pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan
- Memperkuat sistem kelembagaan yang mengelola, menyelesaikan masalah dan konflik di wilayah pesisir
- Menjamin akses masyarakat pesisir untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir yang telah dikelola secara lestari

KEKHUSUSAN UU PWP

- ◉ Mempromosikan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu sesuai karakteristik pesisirnya
- ◉ Mengelola ekosistem pesisir yang rentan (mangrove, karang, lamun, estuari, gumuk, garis pantai) dalam wilayah pesisir (*coastal areas*)
- ◉ Merencanakan, memelihara, memanfaatkan dan merehabilitasi kerusakan ekosistem pesisir.
- ◉ Memberikan keberpihakan kepada seluruh stakeholder, khususnya masyarakat pesisir
- ◉ Menata mekanisme konflik pemanfaatan dan kewenangan serta penyelesaian sengketa
- ◉ Pemberdayaan masyarakat pesisir
- ◉ Mendorong kemitraan berbagai pihak dalam pengelolaan wilayah pesisir

Coral Reef Management Project (COREMAP)

- ***Tujuan Umum:***

Untuk menjamin ketersediaan ikan karang dan kelestarian ekosistem terumbu karang melalui peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah; penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat.

- ***Tujuan Khusus:***

1. Menjamin kelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait secara berkelanjutan
2. Memberdayakan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah dalam mengelola ekosistem terumbu karang dan yang terkait.
3. Mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pesisir di lokasi COREMAP

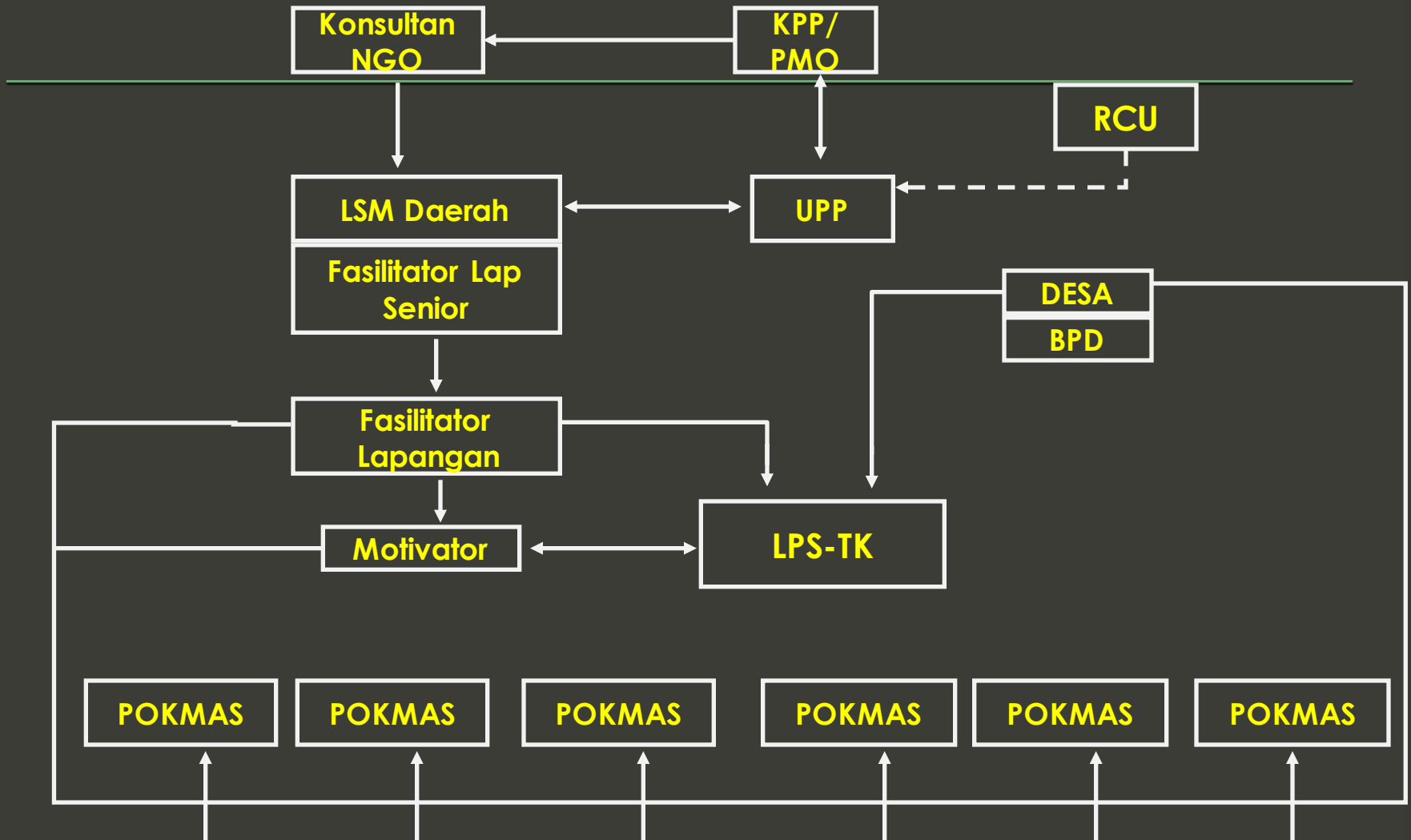
COREMAP PHASE II

- PERSIAPAN** : 2002 - 2003
- IMPLEMENTASI EFEKTIF TAHUN** : 2004 – 2009
- FOKUS KEGIATAN** : PENGELOLAAN TERUMBU KARANG BERBASIS MASYARAKAT
- EXECUTING AGENCY PERIKANAN** : DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- SUMBER DANA** : ADB, GEF, WB, IDA, APBN, APBD, INKIND, MASYARAKAT
- INSTANSI TERKAIT** : BAPPENAS, DKP, LIPI, DEPHUT, LH, DEP DAGRI, PEMDA, TNI-AL, POLRI.
- KEGIATAN TERKAIT** : KONSERVASI LAUT, PERIKANAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, WISATA BAHARI, INDUSTRI

PELAKSANA PROYEK DI TINGKAT MASYARAKAT (PENERIMA MANFAAT)

- **Lembaga Pengelola Terumbu Karang (LPS-TK):**
Adalah lembaga yg dibentuk di kecamatan atau desa lokasi proyek yg memiliki peran dalam menyusun dan menjalankan RPTK, merangkum semua usulan kegiatan dari Pokmas dan unsur pemerintah desa, mengelola anggaran Pokmas dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yg dilaksanakan oleh Pokmas
- **Kelompok Masyarakat (POKMAS):**
Adalah suatu organisasi/kelompok masy desa yg dibentuk oleh masyarakat sendiri serta mempunyai bidang tugas tertentu.

TATA KERJA ORGANISASI PENGELOLAAN BERBASIS MASYARAKAT



Keterangan :

- - - : Koordinasi dan Konsultasi
- : Masukan/input dan pendampingan

KOMPONEN UTAMA KEGIATAN PROYEK

1. PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PROYEK

1.1 Penguatan Kelembagaan Nasional dan Daerah

- ❖ Mengembangkan legal frame work, isu-isu strategis dan pedoman praktis pengelolaan TK
- ❖ Menyusun grand strategi dan kebijakan pengelolaan terumbu karang melalui pengembangan konservasi laut dengan berbagai tujuan, khususnya terkait dengan pengelolaan perikanan berkelanjutan.
- ❖ Mempersiapkan Coral Reef Management Plans (CRMPs).

1.2 Penguatan CRITC (*Coral Reef Information and Training*)

- ❖ Menyusun dan mengembangkan program teknis nasional dan regional CRITCs melauai penelitian, training, dll.
- ❖ Mendukung pengembangan sistem BME (Benefit, Monitoring and Evaluation) dan CRSIS (Coral Resources Spatial Information Systems)
- ❖ Mendukung Manajemen Informasi

1.3 Pengembangan SDM dan Penyuluhan

- ❖ Pengembangan kapasitas kelembagaan dan aparat
- ❖ Pengembangan program pendampingan dan penyuluhan
- ❖ Pengembangan sosial masyarakat

1.4 Manajemen Proyek

2. PENGELOLAAN SUMBERDAYA TERUMBU KARANG BERBASIS MASYARAKAT

2.1 Pemberdayaan Masyarakat

- ❖ **Penyiapan kelompok masyarakat**
- ❖ **Penguatan kapasitas kelembagaan desa**

2.2 Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat

- ❖ **Pengendalian kegiatan yang dapat merusak terumbu karang**
- ❖ **Alokasi sumberdaya dalam kegiatan masyarakat**
- ❖ **Rehabilitasi ekosistem terumbu karang**
- ❖ **MCS berbasis masyarakat**

2.3 Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Sosial

- ❖ **Pembangunan kebutuhan prasarana dasar**
- ❖ **Pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi**
- ❖ **Perlindungan dan rehabilitasi lingkungan**

2.4 Penghidupan dan Mata Pencaharian Alternatif Masyarakat

- ❖ **Penyiapan dan pengembangan mata pencaharian alternatif**
- ❖ **Pengembangan keterampilan pengelolaan usaha skala kecil**
- ❖ **Pengembangan jaringan pemasaran**

PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PLBPM)

TUJUAN

1. Sbg suatu 'program' – untuk memberikan pembelajaran secara tidak langsung kepada masyarakat pesisir agar mereka dapat menemukan cara2 pemecahan permasalahan dan kebutuhannya dari diri mereka sendiri dengan memberdayakan segenap potensi yang ada, sehingga diharapkan terjadi proses keberlanjutan pengelolaan oleh masyarakat.
2. Sbg suatu program yang diharapkan dapat memberikan hasil (output) yang terukur dan bermanfaat riil bagi masyarakat pesisir sesuai dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan mereka. Fokus kegiatan meliputi:
 - ❖ Peningkatan / perbaikan lingkungan pesisir;
 - ❖ Peningkatan / perbaikan kondisi lingkungan permukiman;
 - ❖ Pembangunan rumah.

KELOMPOK SASARAN (TARGET GROUP)

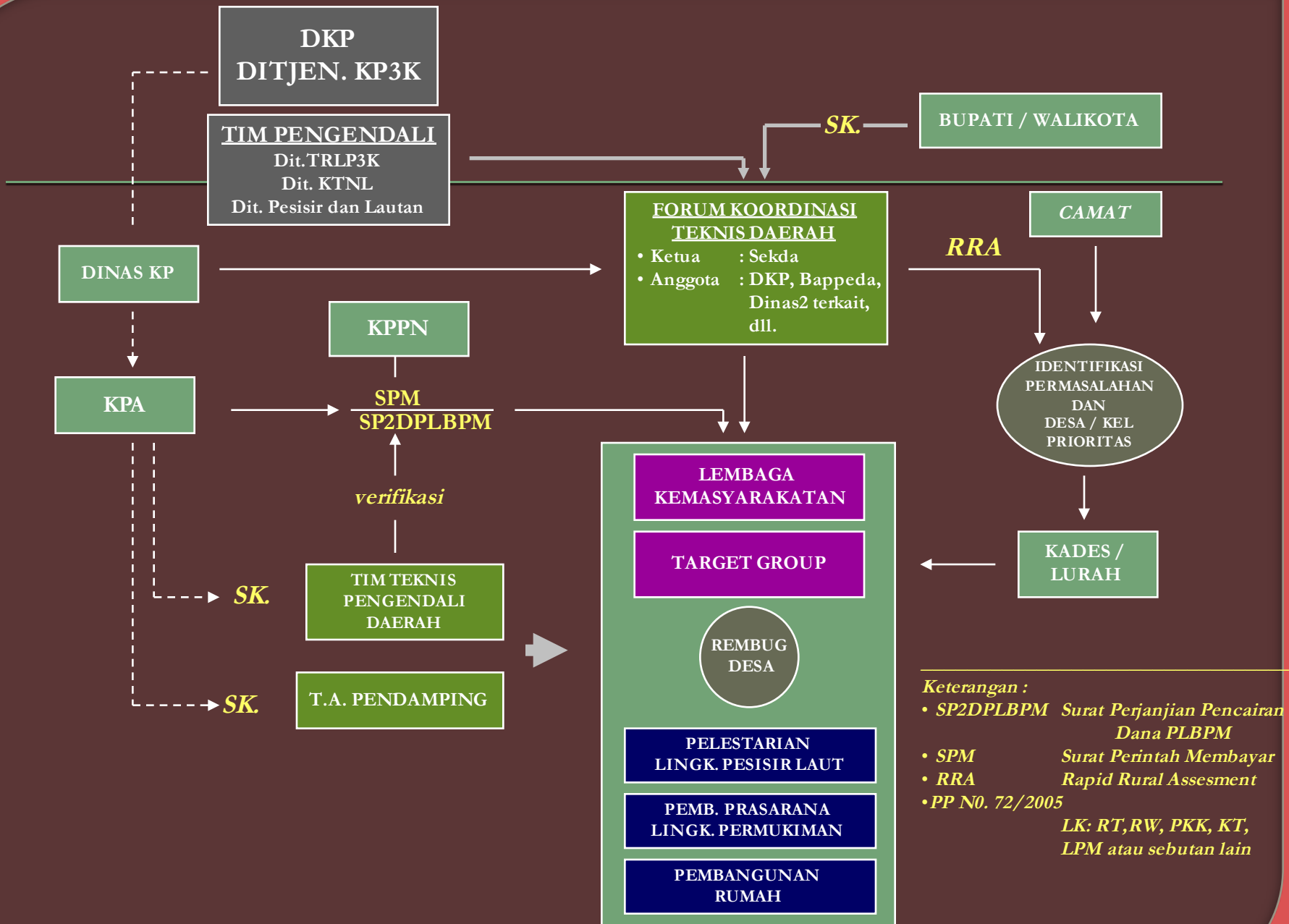
Masyarakat pesisir yang dapat meliputi nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya yang bermukim sebagai satu komunitas di kawasan pesisir dengan taraf ekonomi relatif lemah atau miskin, mempunyai kondisi lingkungan permukiman yang buruk, serta diutamakan mempunyai permasalahan degradasi lingkungan pesisir.

LOKASI

Meliputi 20 Kabupaten / Kota :

- 1.Kab. Malang.
- 2.Kab. Pacitan.
- 3.Kab. Tegal.
- 4.Kab. Nunukan.
- 5.Kota Bima.
- 6.Kab. Ende.
- 7.Kab. Serdang Bedagai.
- 8.Kab. Indramayu.
- 9.Kab. Lampung Selatan.
- 10.Kab. Lampung Barat.
11. Kab. Pasuruan.
12. Kab. Sumenep.
13. Kota Jakarta Utara.
14. Kab. Panajam Paser Utara.
15. Kab. Bengkayang.
16. Kab. Jepara.
17. Kab. Bengkalis.
18. Kab. Ciamis.
19. Kab. Pandeglang.
20. Kab. Bangka Barat.

Pada setiap Kabupaten / Kota ditentukan 2 (dua) desa / kelurahan yang diprioritaskan memiliki kriteria target group, kecuali Kab. Nunukan, Kab. Malang, Kab. Tegal, dan Kab. Pacitan ditentukan 3 (tiga) desa.



ORGANISASI PENGELOLAAN PROGRAM PLBPM



Pembangunan Rumah Ramah Bencana

A traditional wooden sailing ship with large, square, yellow sails is shown on a blue sea. The ship is viewed from a low angle, emphasizing its size and the height of its masts. The sails are fully deployed and catch the light, creating a warm, golden glow. The ship's hull is dark wood, and the deck is visible with various rigging and equipment. The background is a clear blue sky and sea.

TERIMA KASIH

TREASURES
OF THE DEEP